



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah diperlukan Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional yang kompeten dan berkualitas;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213) jo. Pasal 10 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 65) disebutkan bahwa Bupati mengatur lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 65).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD UPT RSUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

8. Tenaga Profesional adalah tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yaitu pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dapat diangkat dan dipekerjakan pada BLUD UPT RSUD secara kontrak atau tetap.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.
10. Direktur BLUD UPT RSUD adalah Pemimpin BLUD UPT RSUD.
11. Pejabat Keuangan adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada BLUD UPT RSUD.
12. Pejabat Teknis adalah Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dari penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
21. Pengangkatan Tenaga Profesional adalah penetapan Tenaga Profesional ke dalam kedudukan jabatan tertentu pada BLUD UPT RSUD.
22. Pemberhentian Tenaga Profesional adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi Pegawai pada BLUD UPT RSUD.
23. Penunjukan adalah cara penempatan pada kedudukan jabatan tertentu dengan memperhatikan kompetensi/keahlian, kelangkaan profesi, pengalaman dan kebutuhan BLUD UPT RSUD.
24. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
25. Staf Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di Unit Pelayanan RSUD.

26. Staf Keperawatan adalah Perawat dan Bidan yang telah terikat perjanjian dengan Rumah Sakit maupun yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan penempatan di Rumah Sakit dari pejabat yang berwenang dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan keperawatan mandiri maupun tindakan pendelegasian dari Profesi lain di Rumah Sakit.

#### Pasal 2

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum pada BLUD UPT RSUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

## BAB II

### PEJABAT PENGELOLA

#### Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional.
- (2) Pejabat Pengelola pada BLUD UPT RSUD meliputi :
  - a. Direktur BLUD UPT RSUD;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Direktur BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Direktur BLUD UPT RSUD.

#### Pasal 4

- (1) Direktur BLUD UPT RSUD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT RSUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
  - h. mengendalikan tugas pengawasan internal;
  - i. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT RSUD kepada Bupati; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Direktur BLUD UPT RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Direktur BLUD UPT RSUD yang berasal dari tenaga profesional tidak dapat bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Direktur BLUD UPT RSUD berasal dari tenaga profesional, maka pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.



## Pasal 6

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur BLUD UPT RSUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

## BAB III PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) BLUD UPT RSUD dapat mengangkat pejabat pengelola dari tenaga profesional.
- (2) Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD UPT RSUD kepada masyarakat.
- (3) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

- (4) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (5) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

#### Pasal 8

- (1) Direktur BLUD UPT RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur BLUD UPT RSUD.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terdapat kekosongan jabatan Direktur BLUD UPT RSUD, maka pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis diusulkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Direktur BLUD UPT RSUD bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Direktur BLUD UPT RSUD.

Bagian Kedua  
Persyaratan Jabatan

Pasal 10

- (1) Persyaratan tenaga profesional untuk dapat diangkat sebagai Direktur BLUD UPT RSUD yaitu :
- a. tenaga medis yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek bisnis yang sehat pada BLUD UPT RSUD;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pimpinan/pengurus perusahaan yang dinyatakan pailit;
  - c. bersedia berhenti dari jabatan/pekerjaan lain yang berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan dan/atau bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sebagai Direktur BLUD UPT RSUD apabila ditetapkan menjadi Direktur BLUD UPT RSUD;
  - d. sanggup menjalankan Praktek Bisnis yang Sehat pada BLUD UPT RSUD;
  - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - f. dikecualikan dari ketentuan pada huruf e apabila memenuhi kondisi tertentu, yaitu:
    - 1) memiliki kompetensi/keahlian tertentu dan/atau pengalaman dalam manajemen tata kelola rumah sakit;
    - 2) terdapat kekosongan jabatan Direktur BLUD UPT RSUD dalam masa transisi perubahan struktur organisasi yang disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan;
    - 3) proses seleksi tidak menghasilkan calon Direktur BLUD UPT RSUD yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; dan/atau
    - 4) berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan fungsi organisasi sesuai kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

- (2) Pengangkatan tenaga profesional sebagai Direktur BLUD UPT RSUD oleh Bupati dengan pengecualian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui penunjukan.
- (3) Pengangkatan tenaga profesional sebagai Direktur BLUD UPT RSUD dengan pengecualian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Persyaratan tenaga profesional untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Teknis BLUD UPT RSUD yaitu :
  - a. berprofesi sebagai dokter atau dokter gigi atau sarjana kesehatan yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek bisnis yang sehat pada BLUD UPT RSUD;
  - b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian BLUD RSUD;
  - c. bersedia berhenti dari jabatan/pekerjaan lain di luar BLUD RSUD apabila ditetapkan menjadi Pemimpin BLUD RSUD;
  - d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat pada BLUD RSUD;
  - e. sudah pernah atau sedang bekerja di BLUD RSUD;
  - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengangkatan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui Seleksi atau Penunjukan.

Paragraf 2  
Seleksi

Pasal 12

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional melalui seleksi dilaksanakan dengan pembentukan kepanitiaan yang terdiri dari :
  - a. Panitia Seleksi;
  - b. Sekretariat.
- (2) Panitia Seleksi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur BLUD UPT RSUD, dan Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur BLUD UPT RSUD.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menetapkan persyaratan dan tata cara seleksi;
  - b. mengumumkan pelaksanaan seleksi;
  - c. melaksanakan seleksi;
  - d. mengumumkan hasil seleksi; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Panitia Seleksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi proses seleksi.

Pasal 13

Seleksi dalam rangka pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesional meliputi tahapan :

- a. Pengumuman;
- b. Pendaftaran pelamar;
- c. Pelaksanaan seleksi; dan
- d. Pengumuman hasil seleksi.

#### Pasal 14

- (1) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
  - c. Wawancara.
- (2) Dalam pelaksanaan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, dan/atau Lembaga lain yang profesional dan kompeten.

#### Paragraf 3 Penunjukan

#### Pasal 15

- (1) Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum, Bupati berwenang menunjuk tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada BLUD UPT RSUD.
- (2) Penunjukan tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada BLUD UPT RSUD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan layanan umum yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (3) Disamping pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukan tenaga profesional sebagai pejabat pengelola pada BLUD UPT RSUD oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai urgensi, kebutuhan dan adanya kondisi tertentu.

### BAB IV PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA

#### Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola pada BLUD UPT RSUD berhenti/diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas;
  - d. melanggar visi, misi, kode etik, peraturan kepegawaian atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan;
  - e. terbukti rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah;
  - f. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/ atau
  - g. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi pada BLUD UPT RSUD, Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD diberhentikan oleh Bupati dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan melalui usulan Kepala Dinas kepada Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f.
- (3) Tata cara pemberhentian pejabat pengelola sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Untuk jabatan Direktur BLUD UPT RSUD dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

- b. Terhadap pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan klarifikasi dan analisa sebagai pertimbangan untuk penyampaian usulan penetapan pemberhentian Direktur BLUD UPT RSUD kepada Bupati;
- c. Untuk jabatan Pejabat Teknis dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati melalui Direktur BLUD UPT RSUD dengan tembusan Kepala Dinas;
- d. Terhadap pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur BLUD UPT RSUD melakukan klarifikasi dan analisa sebagai pertimbangan untuk penyampaian usulan penetapan pemberhentian Direktur BLUD UPT RSUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENGELOLA

### Pasal 18

- (1) Pejabat pengelola berhak mendapatkan remunerasi yang meliputi :
  - a. gaji yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap, insentif dan bonus yang bersifat tambahan;
  - c. hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pengelola wajib melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola BLUD UPT RSUD serta menjalankan prinsip Praktek Bisnis yang Sehat.



**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Februari 2020

**BUPATI KARANGANYAR,**

ttd.

**JULIYATMONO**

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**

ttd.

**SUTARNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya

